

BAB II

DINAMIKA HUBUNGAN RI-AFRIKA DAN TUNISIA

SEBELUM 2008

Dalam bab ini penulis banyak membahas mengenai prinsip Politik Luar Negeri Indonesia, serta kondisi hubungan perhatian Indonesia ke Afrika secara umum. Kemudian juga memaparkan sekilas tentang Tunisia dalam bidang politik, sosial budaya, dan gambaran umum mengenai hubungan perdagangan dengan memulai bentuk proses kerjasama yang dilakukan Indonesia-Tunisia yang berupaya untuk meningkatkan perekonomian masing-masing Negara. Dan menjelaskan tentang persetujuan perjanjian perdagangan bebas Tunisia-Uni Eropa 1 Januari 2008, dan peluang yang dimiliki oleh Indonesia untuk bersaing di pasar Tunisia, dan menjadikan Tunisia sebagai *gateway* untuk memasuki pasar Uni Eropa dan Afrika.

A. Haluan Politik Luar Negeri Indonesia

Politik Luar Negeri adalah kumpulan kebijakan sesuatu Negara untuk mengatur hubungan-hubungan luar Negeri nya. Ia merupakan bagian dari kebijakan nasional dan semata-mata dimaksudkan untuk mengabdikan kepada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan khususnya tujuan untuk suatu kurun waktu yang sedang dihadapi lazim disebut kepentingan nasional.¹ Pada hakekatnya ia merupakan suatu pola sikap atau respon terhadap lingkungan ekologisnya. Respon tersebut mempunyai latar belakang yang berinteraksi dengan persepsi, pengalaman, kekayaan alam serta kebudayaan politik

¹Sumpena, Prayitnasaputra. *Politik Luar Negeri Republik Indonesia*. Bandung: Remadja Karya, 1984. Hal 7

yang biasanya dimanifestasikan sebagai falsafah bangsa dan diakomodasikan dalam konsitusi.

Kebijakan luar negeri Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain sejarah nasional, kondisi geografis, kependudukan dan keamanan nasional. Faktor-faktor ini mendorong Indonesia untuk menggunakan kebijakan luar negeri yang bebas aktif.² Bebas aktif adalah politik luar negeri Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sila ke dua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, sebagai perwujudan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 yaitu bahwa pemerintah Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.³ politik bebas aktif ini jugalah yang diperkenalkan pertama kali oleh wakil presiden Mohammad Hatta pada tahun 1948.

Bebas berarti tidak terikat oleh suatu ideologi atau oleh politik Negara asing atau Blok Negara-Negara tertentu, atau Negara-Negara Adikuasa (*super power*). Aktif artinya dengan sumbangan realistis giat mengembangkan kebebasan persahabatan dan kerja sama internasional dengan menghormati kedaulatan Negara lain.

Jadi politik luar negeri yang bebas aktif, mendukung kemerdekaan bangsa-bangsa dari kungkungan penjajahan, mempererat hubungan dengan bangsa-bangsa lain dengan sama derajat, tegak sama tinggi dan duduk sama rendah. Dan ini termaktub dalam GBHN 1983 dikatakan antara lain pelaksanaan politik luar negeri yang bebas

² Djumadi, *Bahan Ajar Mata Kuliah Politik Luar Negeri Indonesia*. Jurusan Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2008. Hal 1

³ A. W. Widjaja, *Indonesia, Asia Afrika, Non Blok, Politik Bebas Aktif* Jakarta, PT. Bina Aksara, 1986. Hal

aktif dilaksanakan secara konsekuen dan diabdikan untuk kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan disegala bidang.⁴

Dalam menjalankan kebijakan luar negeri tersebut, Indonesia mematuhi bebarapa panduan sebagai berikut ini:

1. Pancasila, sebagai ideologi Negara
2. Undang-Undang Dasar 1945
3. Ketahanan nasional, yang didasarkan pada wawasan nusantara
4. Program pemerintah atau rencana pembangunan

Panduan-panduan tersebut dinyatakan dalam ketentuan Undang-Undang, terutama Undang-Undang no. 37/1999 tentang hubungan luar negeri.

Keputusan Presiden (KEPRES) No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPM) 2004-2009, telah digaris bawahi bahwa salah satu prioritas pembangunan nasional adalah untuk memperkuat kebijakan luar negeri dan meningkatkan kerjasama internasional. Prioritas tersebut dipahami akan dapat meningkatkan peranan Indonesia dalam hubungan internasional dan akan dapat juga membantu menciptakan dunia yang damai; serta untuk mewujudkan/ menjaga citra positif Indonesia dan kepercayaan internasional terhadap Indonesia yang selanjutnya akan mendorong penciptaan tatanan dan kerjasama ekonomi regional dan internasional yang lebih baik.⁵

Tujuan politik luar negeri Indonesia adalah mengabdikan kepada tujuan nasional.

Adapun tujuan nasional jangka panjang adalah sebagai mana termaktub dalam alinea

keempat UUD '45 yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sedangkan tujuan nasional jangka pendek tergantung dari apa yang ditetapkan untuk dicapai dalam waktu yang singkat.⁶

Untuk tercapai tujuan-tujuan tersebut, maka dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Agenda peningkatan kualitas diplomasi Indonesia di berbagai forum internasional sebagai upaya untuk mencapai kepentingan-kepentingan nasional, termasuk melakukan penyelesaian masalah-masalah perbatasan dan perlindungan kepentingan masyarakat Indonesia di luar negeri
2. Melanjutkan komitmen Indonesia dalam menjaga kerjasama antar Negara melalui kerjasama internasional, bilateral, multilateral, dan kerjasama-kerjasama regional lainnya.
3. Meningkatkan peranan dan dukungan masyarakat internasional yang lebih besar terhadap Indonesia guna pemenuhan/penciptaan tujuan-tujuan pembangunan nasional Indonesia.

Kebijakan luar negeri Indonesia didasarkan kepada pendekatan strategis yang menekankan pendekatan lingkaran konsentris. Pendekatan ini digunakan dengan mempertimbangkan kedekatan geografis dan pengaruh dari lingkungan eksternal terhadap Indonesia. Lingkungan terdekat akan menciptakan dampak yang relatif besar

⁶ Sumpena, Prawirasaputra., *Politik Luar Negeri Republik Indonesia*. Bandung. Remadja Karya. 1984. Hal 23

pada setiap aspek situasi dalam negeri di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa situasi dalam negeri dan luar negeri memiliki pengaruh dan keterkaitan pada pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia.⁷

ASEAN adalah sebagai fokus pencapaian kebijakan luar negeri di kawasan. Sehingga ASEAN ditempatkan Pada lingkaran dalam dimana terdapat mekanisme kelembagaan pendukungnya. Khusus bagi Indonesia, berbagai inisiatif pengembangan pasar modal ASEAN agar lebih likuid dan bila perlu diselaraskan dengan agenda nasional.⁸ Untuk itu dilakukan berbagai upaya untuk memposisikan ASEAN sebagai pusat dari beragam kerjasama internasional di Asia dan Pasifik. Dalam kaitan ini, kebijakan luar negeri di Asia Tenggara terkonsentrasi pada perluasan, pengintegrasian dan peningkatan struktur dan mekanisme ASEAN. Contoh-contoh keberhasilan dalam upaya ini adalah perjanjian pembentukan secara bertahap masyarakat ASEAN melalui tiga pilarnya yakni Masyarakat Ekonomi ASEAN, Masyarakat Keamanan ASEAN, dan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN.

Pada lingkaran yang lebih luas, kebijakan luar negeri Indonesia juga telah ditujukan untuk membangun, mengembangkan dan memperkuat dialog dalam kerangka kerjasama dengan Negara-Negara Asia Timur. Dalam hal ini penerapan kebijakan luar negeri Indonesia di wilayah regional ditujukan untuk membangun mekanisme dialog dan kerjasama kelembagaan yang mungkin untuk dilaksanakan dan saling

⁷ Op.cit. hal 2

⁸ Bank Indonesia, *Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015*, Jakarta, Gramedia, Hal. 240

menguntungkan. Strategi yang sama juga diterapkan pada lingkungan Negara-Negara Pasifik, India dan jangkauan kawasan yang lebih luas yaitu Asia-Afrika.⁹

B. Kondisi Hubungan Indonesia-Afrika

Pada Pembukaan UUD 1945 alenia IV yang menyebutkan, bahwa bangsa Indonesia ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kalimat tersebut menjadi landasan politik luar negeri Bebas Aktif. Bebas artinya bangsa Indonesia tidak memihak pada salah satu blok (kekuatan). Sedangkan Aktif artinya bahwa bangsa Indonesia berusaha sekuat-kuatnya untuk memelihara perdamaian dunia sesuai dengan cita-cita PBB. Salah satu bukti peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia adalah memprakarsai dan menyelenggarakan Konferensi Asia- Afrika (KAA).

Bangsa-bangsa Asia - Afrika memiliki persamaan nasib dan sejarah yakni sama-sama menjadi sasaran penjajahan bangsa-bangsa Eropa. Dan kemudian Semakin meningkatnya kesadaran Bangsa-Bangsa Asia-Afrika yang masih terjajah untuk memperoleh kemerdekaan misalnya, Yaman sedang berjuang membebaskan Aden dari kekuasaan Inggris, Rakyat Aljazair, Tunisia, Maroko, Sudan, dan Kongo sedang membebaskan tanah airnya dari kekuasaan bangsa Eropa, dan lain-lain. Perubahan politik yang terjadi setelah Perang Dunia II berakhir yakni situasi internasional diliputi kecemasan akibat adanya perlombaan senjata antara Blok Barat dan Blok Timur. Diantara Bangsa-Bangsa Asia yang telah merdeka masih belum terdapat kesadaran

⁹ Op. cit. hal 3

untuk bersatu, yang kemudian Rusia dan Amerika Serikat ikut melibatkan diri dalam masalah tersebut.

1. Pembentukan KAA dan Pendirian GNB

Ada 3 (tiga) masalah pokok yang dibicarakan dalam konferensi ini yaitu, kerjasama ekonomi kebudayaan dan politik. Dalam masalah politik dibicarakan juga tentang soal hak asasi manusia, hak menentukan nasib sendiri, kolonialisme, perlucutan senjata dan koelesistensi secara damai. Konferensi Asia- Afrika sendiri menghasilkan dasa sila Bandung yang kemudian dikenal juga sebagai semangat Bandung.¹⁰

KAA merupakan suatu bentuk pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Dimana di dalam konferensi tersebut, Indonesia berlaku bebas, yang seperti dikatakan Hatta, bahwa bebas berarti tidak memihak blok manapun. Dan aktif yang berarti turut serta dalam menciptakan perdamaian abadi. Karena di dalam konferensi tersebut ditanamkan jiwa toleran yang mencakup prinsip untuk hidup berdampingan secara damai, saling menghargai terhadap integritas dan kedaulatan negara lain, tidak turut campur tangan atas masalah domestik yang dihadapi negara lain, serta saling bekerja sama yang timbal balik. Maka KAA memiliki arti strategis terhadap politik luar negeri Indonesia, karena KAA merupakan bentuk perwujudan politik bebas aktif yang diusung oleh Indonesia, yakni menciptakan perdamaian dunia. Selain itu dalam konferensi ini, Indonesia dapat menjalin hubungan baik dengan negara-negara di Asia-Afrika. Landasan-landasan dalam politik luar negeri RI, yaitu kemerdekaan dan perdamaian coba diwujudkan oleh pemerintah dalam konferensi ini

Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung tahun 1955 merupakan proses awal lahirnya GNB. KAA diselenggarakan pada tanggal 18-24 April 1955 dan dihadiri oleh 29 Kepala Negara dan Kepala Pemerintah dari benua Asia dan Afrika yang baru saja mencapai kemerdekaannya.¹¹ KAA ditujukan untuk mengidentifikasi dan mendalami masalah-masalah dunia waktu itu dan berupaya menformulasikan kebijakan bersama negara-negara baru tersebut pada tataran hubungan internasional. KAA menyepakati 'Dasa Sila Bandung' yang dirumuskan sebagai prinsip-prinsip dasar bagi penyelenggaraan hubungan dan kerjasama antara bangsa-bangsa. Sejak saat itu proses pendirian GNB semakin mendekati kenyataan, dan dalam proses ini tokoh-tokoh yang memegang peran kunci sejak awal adalah Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser, Presiden Ghana Kwame Nkrumah, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, Presiden Indonesia Soekarno, dan Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito. Kelima tokoh dunia ini kemudian dikenal sebagai para pendiri GNB¹². Hampir semua Negara peserta konperensi Asia- Afrika, juga termasuk Negara Non Blok, sering juga disebut sebagai gerakan Negara Non Blok¹³

GNB berdiri saat diselenggarakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) I GNB di Beograd, Yugoslavia, 1-6 September 1961. KTT I GNB dihadiri oleh 25 negara yakni Afghanistan, Algeria, Yaman, Myanmar, Kamboja, Srilanka, Congo, Cuba, Cyprus, Mesir, Ethiopia, Ghana, Guinea, India, Indonesia, Iraq, Lebanon, Mali, Morocco, Nepal, Arab Saudi, Somalia, Sudan, Suriah, Tunisia dan Yugoslavia. Pada KTT I ditegaskan bahwa GNB tidak diarahkan pada suatu peran pasif dalam politik

¹¹ http://id.wikipedia.org/wiki/Dasasila_Bandung. Dikutip Tanggal 6 April 2011

¹² <http://teko.unipancasila.ac.id/?p=776> Dikutip Tanggal 6 April 2011

internasional, tetapi untuk memformulasikan posisi sendiri secara independen yang merefleksikan kepentingan negara-negara anggotanya.¹⁴

GNB menempati posisi khusus dalam politik luar negeri Indonesia karena Indonesia sejak awal memiliki peran sentral dalam pendirian GNB.¹⁵ KAA tahun 1955 yang diselenggarakan di Bandung dan menghasilkan 'Dasa Sila Bandung' yang menjadi prinsip-prinsip utama GNB, merupakan bukti peran dan kontribusi penting Indonesia dalam mengawali pendirian GNB. Secara khusus, Presiden Soekarno juga diakui sebagai tokoh penggagas dan pendiri GNB. Indonesia menilai pentingnya GNB tidak sekedar dari peran yang selama ini dikontribusikan, tetapi terlebih-lebih mengingat prinsip dan tujuan GNB merupakan refleksi dari perjuangan dan tujuan kebangsaan Indonesia sebagaimana tertuang dalam UUD 1945.¹⁶

2. Pelopor Pembentukan NAASP

Hubungan politik antara Indonesia dan Afrika Selatan terjalin lama sejak sebelum pembukaan hubungan diplomatik. Indonesia mendukung *the African National Congress* (ANC) pada masa perjuangan melawan Apartheid, dan menjaga posisi ini terus menerus serta memberikan sanksi terhadap rezim Apartheid. Hubungan bilateral antara ANC dan Indonesia memberikan sebuah platform bagi Negara-Negara di Asia untuk berjuang melawan Apartheid.¹⁷

Afrika Selatan dan Indonesia bekerjasama dalam menkoordinasikan kegiatan-kegiatan *New Asia-Africa Strategic Partnership* (NAASP) Kemitraan Strategis Asia-

Afrika Baru. Kedua negara juga memiliki mandat untuk menjadi *co-chair* Pertemuan Asia–Afrika yang dijadwalkan diselenggarakan di Afrika Selatan pada tahun 2010. Tanggung jawab sebagai tuan rumah bersama memberikan platform yang lain untuk hubungan dan pemahaman yang lebih dekat antara kedua Negara.¹⁸

Pada tanggal 22-23 April 2005, Negara-Negara Asia dan Afrika memperbaharui solidaritas mereka yang telah berjalan lama pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Afrika 2005 di Jakarta. KTT AA tahun 2005 tersebut telah menghasilkan beberapa kesepakatan akhir, yang terpenting adalah *Declaration on the New Asian African Strategic Partnership* (NAASP), *Joint Ministerial Statement on the New Asian African Strategic Partnership Plan of Action*; dan *Joint Asian African Leaders' Statement on Tsunami, Earthquake and other Natural Disasters*.¹⁹ Deklarasi NAASP tersebut merupakan manifestasi dari pembentukan “jembatan” intrakawasan dengan komitmen kemitraan strategis baru antara Asia dan Afrika yang mencakup tiga pilar kerjasama, yaitu solidaritas politik, kerja sama ekonomi dan hubungan sosial budaya, yang di dalamnya mencakup mekanisme interaksi antar pemerintah, antar organisasi regional dan subregional serta antar masyarakat (*people-to-people contact*).²⁰

KTT AA tahun 2005 dihadiri oleh perwakilan dari 106 negara Asia dan Afrika yang terdiri dari 54 negara Asia dan 52 Negara Afrika. KTT menyepakati sebuah mekanisme tindak lanjut untuk proses institusionalisasi melalui pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) setiap 4 tahun sekali yang dilaksanakan bersamaan dengan

¹⁸ <http://www.kbri-canberra.org.au/lains/Hasil%20KTT%20AA%202005.pdf>. Dikutip Tanggal 8 April 2011

Business Summit, Pertemuan Tingkat Menteri setiap 2 tahun sekali, serta *Sectoral Ministerial* dan *Technical Meeting* lainnya apabila diperlukan.²¹

Sejak tahun 2005 Indonesia dan Afrika Selatan menjadi Ketua Bersama (*Co-Chairs*) NAASP. Dalam mengemban tugas sebagai *Co-Chairs*, Indonesia telah berperan aktif dalam upaya mengembangkan NAASP. Indonesia dalam kurun waktu 2006-2010 telah berhasil melaksanakan 22 program di bawah kerangka kerjasama NAASP, antara lain: *NAASP-UNEP Workshop on Environmental Law and Policy* tahun 2006 *Asian African Forum on Genetic Resources, Traditional Knowledge, and Folklore* tahun 2007, dan *Apprenticeship Program for Mozambican Farmers* tahun 2010.²² Indonesia juga menjadi tuan rumah bagi *NAASP Ministerial Conference on Capacity Building for Palestine* tahun 2008 yang dihadiri oleh 218 peserta dari 56 negara dan 3 organisasi internasional.

Komitmen bagi pengembangan NAASP juga dibagi bersama dengan negara-negara peserta NAASP yang lain. Menyebutkan beberapa diantaranya, Malaysia telah melaksanakan *Training Course for Diplomats* tahun 2007 dan *Training Course in Disaster Management* tahun 2008, serta China yang telah melaksanakan *The 5th Training Program for Staff from African Chambers* dan *China-Zambia Trade and Investment Forum*.²³

²¹ Op.cit

²² Ibid

²³ <http://www.kemlu.go.id> Dikutip pada Tanggal 06 April 2011

Dengan pandangan untuk memberikan berbagai rekomendasi bagi KTT NAASP mendatang, *NAASP Senior Officials' Meeting* (SOM) diadakan di Jakarta pada tanggal 12-13 Oktober 2009. Pertemuan ini berhasil membahas beberapa agenda penting, khususnya usulan *the 8 Focus Areas of Cooperation* yang dimaksudkan sebagai mekanisme panduan untuk mengarahkan berbagai skema kerja sama di bawah rerangka NAASP yang telah dirumuskan dalam KTT AA 2005 ke dalam beberapa kegiatan yang realistis dan bersifat berorientasi pada hasil. Delapan bidang kerja sama yang telah disepakati dalam pertemuan ini yaitu: *Counter Terrorism; Combating Trans-national Organized Crime; Food Security; Energy Security; Small and Medium Enterprises; Tourism; Asian African Development University Network; serta Gender Equality and Women Empowerment.*²⁴ Beberapa negara Asia seperti Bangladesh, China, Jepang, Filipina, dan Thailand telah menunjukkan kesediaan untuk menjadi *Champion Countries* dari bidang kerjasama tersebut, berdampingan dengan *Champion Countries* dari negara Afrika. Indonesia sendiri menjadi *Champion Country* dari kawasan Asia bersama dengan Aljazair dari kawasan Afrika untuk bidang kerjasama *Counter-Terrorism.*²⁵

²⁴ <http://www.deplu.go.id>. Dikutip Tanggal 06 April 2011

²⁵ <http://www.scribd.com/doc/18570340/mdstika>. Dikutip Tanggal 6 April 2011

C. Kondisi Hubungan Indonesia-Tunisia

Pada tahun 1960, pemerintah Indonesia membuka kedutaan besar di Tunisia sebagai realisasi pembukaan hubungan diplomatik yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia sejak kemerdekaan Tunisia, dan presiden RI pertama, Ir Soekarno, mengunjungi Tunisia pada tahun 1956.²⁶

Hubungan Indonesia-Tunisia di sektor ekonomi dan perdagangan masih perlu inovasi karena jauhnya jarak antara kedua Negara.²⁷ Orientasi pengusaha Tunisia lebih banyak ke Eropa dan Amerika karena secara geografis lebih dekat. Sedangkan orientasi pengusaha Indonesia juga banyak ke Negara-negara Asia dan Eropa sehingga Negara-Negara Afrika Utara ini tidak terlalu banyak mendapat perhatian, padahal peluang-peluang bisnis di Tunisia cukup besar.²⁸

Kunjungan presiden RI tersebut kemudian dilanjutkan dengan kunjungan menteri luar negeri (MENLU) RI. Dalam pertemuan antara menlu kedua Negara, telah dibicarakan mengenai upaya-upaya untuk menterjemahkan kerjasama politik yang kokoh kedalam hubungan kerjasama ekonomi yang kongkrit. Menlu Tunisia menawarkan peluang bagi Indonesia untuk memanfaatkan Tunisia sebagai platform dalam hubungan dan kerjasama ekonominya dengan Negara-Negara Eropa maupun asosiasi kerjasama Tunisia dengan Negara-negara di kawasan. Dalam kunjungan tersebut, telah dicapai persetujuan mengenai konsultasi bilateral tingkat Menlu RI-Tunisia

²⁶ <http://www.deplu.go.id>. Dikutip Tanggal 10 April 2011

²⁷ <http://ed.dikabendramustajim.blogspot.com/2010/03/focus.gov.id-prioritaskan-pertukaran.html>, dikutip

Sebagai tindak lanjut dari kunjungan presiden -RI dan kunjungan Menlu RI ke Tunisia, telah disepakati untuk menterjemahkan hubungan politik yang kokoh dan dengan besahabat antara kedua Negara kearah kerjasama ekonomi yang kongkrit. Telah disepakati pula untuk mengadakan kegiatan misi dagang Tunisia ke Indonesia.²⁹

1. Politik

Hubungan bilateral dibidang politik antara Indonesia- Tunisia telah terjalin baik bahkan sejak sebelum kemerdekaan Tunisia, Indonesia pertama kali membuka kedutaan besarnya di tunis pada tahun 1960, yang sekaligus menandai pembukaan hubungan diplomatik antara kedua Negara. Namun karena terbatasnya keuangan Negara, perwakilan Indonesia di Tunisia terpaksa ditutup pada tahun 1967 dan baru dibuka kembali pada tahun 1977. Sementara itu, kedutaan besar Tunisia di Jakarta dibuka pada tanggal 14 oktober 1985.³⁰

Atas dasar kedekatan dan posisi yang sama antara Indonesia dan Tunisia, kedua Negara pada umumnya saling mendukung dalam pencalonan masing-masing keanggotaan di berbagai organisasi internasional antara lain, dukungan Tunisia atas pencalonan kembali Indonesia sebagai anggota IMO (*International Maritime Organization*), dukungan Indonesia ke Tunisia sebagai presiden eksekutif organisasi pariwisata dunia (WTO) dan pengaturan saling dukung keanggotaan kedua Negara di dewan HAM.³¹

a. Protektorat Prancis

Berdasarkan perjanjian Mersa pada tahun 1883, Tunisia dinyatakan berada dibawah protektorat perancis. Sebelumnya, banyak kekuasaan yang saling berganti di

²⁹ Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Tunis Dan Persatuan Pelajar Indonesia, *Tunisia Selayang Pandang*..2006, hal 3.

³⁰ Ibid. Hal 5

³¹ Kedutaan Besar Republik Indonesia *Keterangan Dasar Republik Tunisia*. Tunis. Juli 2006

Tunisia antara lain seperti kekuasaan berber samapi dengan tahun 1050 yang kemudian disusul dengan masuknya Italia pada tahun 1087, normandia pada tahun 1148, spanyol dan kemudia kerajaan Ottoman. Dalam tahun 1606, di Tunisia secara de facto dinyatakan merdeka tetapi tetap merupakan bagian dari kerajaan Ottoman. Kekuasaan Bey yang saling berganti di Tunisia mendatangkan banyak persoalan seperti krisis ekonomi.³²

Pada tahun 1881 tatkala berada dibawah kekuasaan Bey Muhammad Al- Sadik, Tunisia mengalami krisis keuangan yang parah. Kesempatan itu merupakan kesempatan baik bagi perancis untuk menyerang Tunisia yang disusul dengan perjanjian Ksar Said yang antara lain menyatakan bahwa perancis dengan resmi menguasai bidang militer, keuangan dan urusan luar negeri Tunisia, sedangkan Bey hanya bidang militer, keuangan yang minimum. Menjelang perang dunia ke-II, perancis menghadapi tantangan dari italia yang mempunyai keinginan keras untuk menguasai Afrika Utara dan juga menghadapi pergerakan nasional Tunisia.³³

Pergerakan nasional Tunisia yang dikenal dengan Destour (konstitusi) dimulai pada tahun 1920 dipimpin oleh sheikh Al-Thai`ibi Habib Bourguiba yang pada tanggal taggal 2 maret 1943 menamakan pergerakan Neo-Destour. Pergerakan ini meluas di kalangan rakyat Tunisia dan berhasil mengadakan pemogokan total pada tanggal 10 April 1938.

Dengan pecahnya perang dunia ke-II, Tunisia- Perancis jatuh ketangan Axis (jerman-Italia). Pelabuhan Tunis dipergunakan oleh pasukan Axis untuk mendaratkan

³² http://www2.trib.ir/worldservice/melaniRADIO/kal_sejarah/maret/20maret.htm Dikutip Tanggal 20 Maret

pasukannya guna memperkuat pertahanan di Libya. Ketika pasukan Axis dikalahkan oleh pasukan sekutu pada tahun 1943, Tunisia kembali ketangan kekuasaan perancis.³⁴

Bey Tunisia, Muhammad Al-Moncef diganti oleh saudara sepupunya Bey Muhammad Al-Amin sebagai Bey Tunisia sampai terbentuknya Republik Tunisia pada tanggal 25 juli 1957.³⁵

b. Kemerdekaan Tunisia

Pada tanggal 27 Februari 1956, Habib Bourguiba memimpin delegasi Tunisia ke Paris untuk perundingan kemerdekaan Tunisia. Protokol persetujuan telah ditandatangani pada tanggal 20 Maret 1956 yang menyatakan bahwa perancis mengakui kemerdekaan Tunisia dan segala haknya untuk menentukan politik luar negerinya, keamanan dan pertahanan serta memberikan kesempatan kepada Tunisia untuk mendirikan tentara nasionalnya. Pasukan Perancis yang masih berada di Tunisia ditarik secara bertahap termasuk yang berada di Berzerte.³⁶

Pemilihan anggota parlemen segera dilakukan pada tanggal 25 Maret 1956 dan 98 kursi dipegang oleh golongan Front Nasional yang tergolong dalam Neo-Destour. Walaupun pemilu tersebut diboikot oleh golongan oposisi "youssefist", Habib Bourguiba tetap terpilih sebagai perdana menteri pada tanggal 11 April 1956 dan memimpin kabinet dengan 16-17 menteri dari Neo-Destour.

³⁴ <http://bataviase.co.id/node/548538>. Dikutip Tanggal 20 Maret 2011

³⁵ ibid

³⁶ Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Tunis Dan Persatuan Pelajar Indonesia. *Tunisia Selayang*

Habib bourguiba memimpin delegasi Tunisia menghadiri konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Habib Bourguiba juga membuka kantor kemerdekaan Tunisia di Jakarta pada tahun 1951. Dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Tunisia merupakan fakta sejarah dan hingga kini dikenang oleh Tunisia.

Bangsa dan rakyat Indonesia telah memberikan dukungan kepada rakyat Tunisia didalam perjuangan mereka memperoleh kemerdekaan dari perancis. Dukungan tersebut diperkuat melalui forum Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955, bahkan rakyat Tunisia mendirikan kantor perjuangan rakyat Tunisia di Jakarta sejak tahun 1951. Pada bulan maret 1956, Tunisia lepas dari jajahan atau protektorat perancis dan pada bulan juli 1957 menjadi Negara Republik. Hubungan antara bapak bangsa kedua Negara, Presiden Soekarno dan Presiden Habib Bourguiba sangat dekat. kedekatan hubungan antara Presiden kedua Negara yang baru merdeka itu mempererat hubungan antara rakyat serta bangsa Indonesia dan Tunisia hingga saat ini.

Pada tahun 1957 Habib Bourguiba mulai dengan kegiatan untuk membentuk mahgribi raya dengan Negara tetangganya, Lybia, dan maroko. Para pemimpin nasional Tunisia mengkritik kekuasaan Bey Al-Amin yang pasif terhadap perjuangan nasional dan mulai bertindak mengusir Bey serta mengumumkan Tunisia sebagai Republik dan Habib Bourguiba sebagai Presidennya.³⁷ Habib Bourguiba kemudian menjadi Presiden pertama Tunisia dan seumur hidup.

Bourguiba diangkat sebagai Presiden pada tahun 1957 setelah tergulingnya Bey Muhammed Al-Amin Raja Tunisia. Melihat pada paham moderat ia memperjuangkan

Akibat terpengaruh pemikiran barat, Habib Bourguiba selalu menghina Islam. Secara eksplisit ia menentang pemahaman dan ketentuan syariat.³⁸ Ketentuan syariat yang sudah jelas dilarang dan dihina. Saat berpidato di depan mahasiswa jurnalistik mengenai sejarah perjuangan Rasulullah SAW, secara fulgar ia menyerang ajaran Islam. Ia menyatakan Al-Qur'an mengandung sekian kekeliruan yang tak bisa lagi diterima akal rasional. Nabi Muhammad SAW dianggapnya sebagai manusia yang kebanyakan mengembara dan mendengar hikayat, dongeng dan legenda murahan saat itu. Ia pun menyatakan secara sengaja ke dalam Al-Qur'an ditambahkan kisah Nabi Muhammad dengan berulang-ulang mengiringi sebutan Rasulullah dengan shallallahu 'alaihi was salam.

Sejak pengangkatannya ke tampuk kekuasaan, ia menyusun maker menghancurkan Islam berikut institusi pengusung, nilai, ulama dan aktivitasnya ia menutup Universitas Az-Zaytunah, Universitas tertua di Afrika, padahal Universitas ini menjadi pusat pendidikan Islam di Afrika dan Eropa meski saat Perancis menjajah Tunisia.³⁹

Salah satu tujuan Habib Bourguiba ialah membaratkan Tunisia, sehingga bahasa Arab diganti bahasa Perancis sebagai bahasa pergaulan masyarakat maupun bangsawan. Mahkamah Syariat diganti dengan mahkamah sipil yang peraturan undang-undangnya mengadopsi sepenuhnya UU barat.

Dalam usahanya melemahkan institusi Islam, Bourguiba merencanakan UU yang bertujuan merempas harta wakaf di seluruh Tunisia, padahal harta wakaf merupakan 33% kekayaan Tunisia. Sekolah dan madrasah yang mengajarkan Al-

³⁸ http://id.wikipedia.org/wiki/Habib_Burquibah.dikutip 20 Maret 2011

Qur'an ditutup. UU lain dikeluarkan buat melegalisaasikan praktik mesum selama disetujui kedua belah pihak.

Kampanye anti Islam mencai puncaknya pada maret 1974 Habib Bourguiba menyeru rakyatnya agar meninggalkan kewajiban berpuasa.⁴⁰ Menurutnya syariat berpuasa dianggap sebagai batu penghalang pertumbuhan ekonomi. Ia terpilih sebagai Presiden seumur hidup oleh parlemen Tunisia pada 1975. Program liberalisasi dimulai pada 1881 menyusul berhentinya PM konservatif Hedi Nourira.

Ribuan wanita Islam disingkirkan dari pegawai pemerintahan dan pusat pendidikan. Banyak yang dilarang berjilbab dalam kehidupan umum seperti rumah sakit dan jalan raya. Meski dilarang UU dan dipersempit aparat keamanan, para pemakai jilbab di Tunisia tetap semakin banyak jumlahnya. Pemakaian jilbab di sana dilarang menurut UU No. 108 tahun 1981. Isinya menegaskan bahwa jilbab ialah busana etnis/kelompok yang bukan kewajiban agama, sehingga dalam UU itu ditulis larangan berjilbab di sekolah dan perguruan tinggi.⁴¹

Akibatnya timbul hubungan yang tidak harmonis antara Presiden Habib Bourguiba dengan gerakan Islam. Hubungan ini disebabkan Bourguiba teracuni pemikiran Barat. Misalnya saat ia mengambil inspirasi pengalaman dan warisan Revolusi perancis tentang persahabatan Negara dan geraja dalam melaksanakan pemerintahan. Dengan berkedok agama, ia memberangus Islam yang diyakininya tidak sesuai pemahaman islamnya. Padahal ia ternyata memakai islam sebagai kedok saja. Ia mengadopsi pemahaman pemikir perancis yang menyatakan semua hal terdahulu pasti usang, sehingga ia menganggap islam itu usang sebab warisan nenek moyang.

⁴⁰ <http://fsuofian.wordpress.com>. Dikutip Tanggal 20 Maret 2011

Menurutnya, institusi keagamaan merupakan batu penghalang utama bagi pembangunan Negara. Baginya, Tunisia memerlukan asas pembangunan baru menurut pemikiran ilmu tulen dan meninggalkan pemikiran Islam.

Pada tanggal 7 Novemver 1987, perdana menteri Jendral Zine El Abidine Ben Ali mengambil alih jabatan Presiden melalui kudeta tidak berdarah karena Habib Bourguiba pada waktu iu dianggap sudah pikun dan sakit-sakitan.⁴² Sejak Presiden Ben Ali berkuasa, konstitusi Tunisia diubah untuk menghindari pengangkatan Presiden seumur hidup dan kemudian ditetapkan jabatan Presiden maksimal hanya untuk 2 kali masa jabatan. Namun konstitusi kemudian diubah kembali melalui referendum tanggal 26 mey 2002. Konstitusi tersebut tidak membatasi beberapa kali presiden Tunisia dapat berkuasa namun hanya membatasi umur maksimal saat mencalonkan diri yaitu 75 tahun.

Dewasa ini Tunisia giat melakukan berbagai upaya penigkatan di berbagai bidang dan tetap memelihara hubungan baik dengan Negara-Negara lain dalam rangka kerjasama internasional. Tunisia juga aktif mengadakan hubungan ekonomi dengan masyarakat internasional, namun hubungan ekonomi yang paling utama dijalin dengan Negara-Negara Arab mahgribi dan Negara Islam lainnya, yang tampak semakin berkembang dan mempunyai dampak politik yang lebih kuat, Pada masa pemerintahan Ben Ali.⁴³

2. Sosial budaya

Hubungan kerjasama antara Indonesia dan Tunisa didasari atas adanya kesamaan antara kedua Negara dalam beberapa hal, Tunisia adalah negara yang

⁴² Op.cit hal 4.

⁴³ <http://www.biografitokohdunia.com> dikutip pada tanggal 20 maret 2011

menjadikan Arab Islam sebagai identitas bangsa, sedangkan Indonesia adalah Negara yang mayoritas islam. Adanya kesamaan antara kedua Negara tersebut merupakan peluang yang sangat berarti bagi kedua Negara untuk meningkatkan hubungan sosial budaya, baik secara bilateral maupun dalam berbagai forum internasional.⁴⁴

Mou program pertukaran kebudayaan yang masih dalam proses pembahasan dan diharapkan dapat segera ditandatangani, karena ini merupakan legal framework dari pemerintah Tunisia, untuk itu sekiranya pemerintah Indonesia mengirim misi-misi kebudayaan untuk ikut serta pada festival-festival kebudayaan di Tunisia yang diadakan setiap tahun pada musim panas (bulan Juli dan Agustus) di Tunisia.

Kerjasama bilateral dibidang keagamaan dilandasi oleh Mou yang ditandatangani oleh masing-masing Menteri Agama dan pengiriman Mahasiswa Indonesia untuk belajar di Universitas Az-zaytunah.⁴⁵ Kedua pihak juga sepakat mengenai pertukaran kunjungan ulama, dosen, da'i untuk menghadiri kegiatan-kegiatan di kedua Negara, partisipasi dalam Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) di kedua Negara serta pertukaran riset, studi keagamaan serta publikasi hasil-hasilnya.⁴⁶

Dibidang kebudayaan telah disepakati untuk saling mengundang misi kebudayaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan festival dan kegiatan budaya di masing-masing Negara. Dalam kaitan ini, pada kesempatan festival *carthage*, sanggar tari bougenville dari Kalimantan barat telah mengadakan pertunjukan tari di kota Sousse dan Tunis. Kerja sama ekonomi Indonesia Tunisia memang masih butuh inovasi dan kerja keras dari kedua belah pihak sehingga bisa lebih kongkrit dan memperkuat romantisme hubungan historis kedua Negara.

⁴⁴ Kedutaan Besar Republik Indonesia, *Tunisia Selayang Pandang*. Tunis. 2006, hal 15

⁴⁵ <http://www.deplu.go.id/tunis>. di Kutip Tanggal 22 Maret 2011

⁴⁶ Op. Cit. Hal 18

3. Penerangan

Hubungan bilateral dibidang penerangan antara Indonesia- Tunisia didasarkan pada perjanjian bidang informasi dan komunikasi yang ditandatangani pada tanggal 14 November 1984 di Tunis. Sementara itu kantor berita Tunisia (TAP) dan kantor berita ANTARA telah mengadakan perjanjian kerjasama yang ditandatangani pada tanggal 28 Januari 1984 di Jakarta.⁴⁷ Perjanjian-perjanjian tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan ditandatangani perjanjian mengenai pembentukan program kerja masing-masing kantor berita.

D. Hubungan Perdagangan Indonesia-Tunisia sebelum 2008

Dalam sidang komisi bersama Indonesia- Tunisia yang ke-6 tanggal 3-4 juli 2001 yang lalu telah dibahas berbagai upaya dan cara untuk meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, industri, sosial budaya, pendidikan dan pariwisata. Pada saat yang sama telah ditandatangani MOU antara Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN) dan *Centre de Promotion des Exportations* (CEPEX) Tunisia. Hal ini merupakan dasar agar kedua Negara sudah saling mempromosikan ekspor masing-masing.⁴⁸

Sidang ke-7 komisi bersama Indonesia-Tunisia telah diadakan dari tanggal 1-2 juli 2003 dan membahas perkembangan dan tindak lanjut serta hasil yang dicapai dari sidang sebelumnya serta masalah lainnya seperti kerjasama perdagangan, industri dan energi, perbankan dan keuangan, investasi, transportasi, telekomunikasi, pos, pariwisata, handicraft kebudayaan pertanian dan lingkungan hidup, kesehatan.

kerjasama dibidang keagamaan, penerangan dan kerjasama dalam peranan wanita.⁴⁹

Dalam kesempatan tersebut telah ditandatangani MOU dibidang kerjasama pariwisata RI-Tunisia, MOU dibidang pelatihan diplomatik antara Deplu RI dan KEMLU Tunisia.

Komoditi-komoditi ekspor utama Indonesia ke Tunisia antara lain kopi, kayu manis, biji pala dan rempah-rempah lainnya, karet, rotan, minyak kelapa sawit, minyak kelapa (kopra), tembakau, metal sheet, album, bahan tekstil dari kapas dan sintesis, sepatu olah raga, sepatu kulit, barang pecah belah, timah hitam, batu baterai, alat-alat listrik, alat potret, alat suntik sekali pakai, peralatan golf dan lainnya. Sedangkan impor Indonesia dari Tunisia antara lain phosphate, korma dan minyak olive.⁵⁰

Produk-produk Indonesia yang mempunyai peluang dan prospek di pasar Tunisia antara lain produk elektronik, baterai kering, suku cadang kendaraan bermotor, aneka produk plastik (mulai dari karung sehingga peralatan rumah tangga). Makanan dalam kaleng (ikan, buah-buahan), teh, kopi, kayu, (kayu gelondongan/ gergajian hingga furniture). Rotan dan tekstil.⁵¹

Pada tanggal 17-22 mei telah dilakukan misi dagang Tunisia ke Indonesia sebagai tindak lanjut dari kunjungan presiden RI dan Menlu RI tahun 2003 agar dicapai kegiatan yang sifatnya kongkrit dibidang ekonomi. Sebanyak 22 pengusaha Tunisia telah ikut serta dan menemukan *Counterpart* nya di Indonesia. Kunjungan tersebut melahirkan joint statement antara UTICA dan KADIN pusat bulan mei 2004 yang

⁴⁹ ibid

⁵⁰ <http://ditiengkni.dendag.go.id/images/TradeBreakthrough/TradeBreakthrough-4.pdf>. Dikutip Tanggal 20

intinya bahwa kedua lembaga akan terus berupaya untuk mendorong hubungan ekonomi kedua Negara.⁵²

Kesepakatan yang tertuang dalam agreed minutes sidang ke-7 komisi bersama RI-Tunisia, disebutkan kedua pihak setuju untuk meningkatkan kerja sama antara free trade zone (FTZ) kedua Negara, dalam hal ini antara Bizerte dan Zarzis FTZ dengan Batam. Kerjasama kerjasama kedua FTZ tersebut diharapkan mampu mendorong masing-masing pengusaha untuk melakukan kegiatan kongkrit, misalnya joint venture, dengan memanfaatkan fasilitas bebas pajak, bea masuk, fasilitas penunjang lainnya, serta kemudahan akses pasar ke wilayah sekitar Negara masing-masing.⁵³

Dalam konteks hubungan bilateral Indonesia- Tunisia, khususnya dibidang ekonomi, hingga saat ini telah ditandatangani beberapa persetujuan kerjasama: persetujuan kerjasama ekonomi dan teknik, persetujuan perdagangan, persetujuan penghindaran pajak berganda, persetujuan promosi dan perlindungan investasi, banking arrangement, MOU kerjasama pariwisata, MOU kerjasama di bidang industry, MOU antara BPEN (Badan Pengembangan Ekspor Nasional) dan CEPEK (Centre de Promotion des Exportations) protokol kerjasama antar kamar dagang dan industry dengan UTICA (*the Tunisian union of commerce, industry and handicrafts*).⁵⁴

Pemerintah Indonesia dan Tunisia menandatangani serangkaian kerjasama bilateral luas, mencakup ekonomi dan politik. Kerjasama tersebut ditandatangani tahun 2003 dan kunjungan Menteri Luar Negeri Hassan Wirayudha yang sebelumnya telah mengadakan pembicaraan dengan mitra dari Tunisia, Menlu Habib Ben Yahia. Pihak Indonesia dalam kerjasama itu memilih perdagangan, industri dan investasi

⁵² <http://www.ambassade-indonesie.intl.tn/download/tunisia>. dikutip pada tanggal 20 maret 2011

⁵³ ibid

⁵⁴ <http://www.depnu.go.id> // Dikutip pada tanggal 22 maret 2011

sebagai bidang-bidang terpenting dalam kerangka kerjasama tersebut. Indonesia merupakan mitra dagang terpenting Tunisia di Asia tenggara dengan volume perdagangan bilateral mencapai 28 juta dinar Tunisia (berkisar 19,6 juta euro, 22,5 juta dolar AS) tahun 2002.⁵⁵ Tunisia mengekspor fosfat, kurma dan tekstil ke Indonesia. Sebaliknya, negara itu membeli minyak kelapa sawit, kulit serta tembakau dari Indonesia.

Berdasarkan perjanjian Asosiasi Tunisia- Uni Eropa, Tunisia banyak memberi kemudahan terhadap barang-barang dari Eropa untuk masuk ke Tunisia berupa fasilitas dan pembebasan bea masuk, demikian pula sebaliknya. Sementara itu, barang-barang dari non-Uni Eropa seperti Indonesia dikenakan bea masuk normal, 43% ditambah PPN 1-18% keadaan ini membuat barang-barang Indonesia cukup tinggi sehingga sulit untuk bersaing di pasar.⁵⁶

Hubungan dagang RI-Tunisia banyak dilakukan melalui negara ketiga antara lain Singapura, Malaysia, Uni Emirat Arab dan Mesir. Adanya perantara menjadikan daya saing produk kedua negara menjadi menurun. Untuk meningkatkan daya saing itu, KBRI Tunis melakukan berbagai upaya mendorong pelaku usaha kedua negara untuk melakukan hubungan usaha langsung antar kedua Negara. Seperti halnya perusahaan SODAT, salah satu perusahaan terbesar no 3 di Tunis berdiri sejak tahun 2002, dengan luas pabrik sekitar 2 Ha. Dengan kapasitas produksi sekitar 5 ribu ton per tahun, SODAT telah melakukan ekspor ke berbagai Negara di Eropa. AS dan Asia termasuk

ke Indonesia. Kurma produksi SODAT dapat diperoleh pada pasar Indonesia, namun diekspor melalui agen di Malaysia.⁵⁷

Proses ekspor impor melalui Negara ketiga ini juga di alami bagi pengiriman produk-produk dari Indonesia. Dari berbagai produk Indonesia yang menjadikan Tunisia sebagai nagara utama sebagai Negara pengimpor dari Indonesia hanya sedikit dari produk Indonesia. Sebab selama ini yang mengekspor ke Tunisia merupakan hubungan langsung dari pengusaha atau pengrajin lokal dengan pembeli dari Tunisia itu sendiri. Dengan menggunakan jasa kargo ataupun perusahaan yang bergerak dibidang pengiriman barang keluar negeri. Jadi belum ada tempat ataupun gudang penyimpanan sekaligus pemasaran produk-produk dari Indonesia oleh pengrajin lokal sendiri.

Dengan hanya mengandalkan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam pengiriman barang—barang ke Tunisia, maka harga produk-produk Indonesia akan lebih susah untuk bersaing dengan produk-produk dari Negara lain yang ada di Tunisia. Seperti halnya produk-produk pengrajin dari Yogyakarta yang sangat diminati oleh pasar Tunisia yang banyak dikirim melalui PT. AGILITY, UNITRAS PRATAMA, DPM. LOGISTICS, PT ECU. LINES INDONESIA, HAFA CARGO, PT. RITRA CARGO. Namun harga dari produk pengrajin Yogyakarta sulit untuk bersaing ketika sudah dipasarkan di Tunisia.

Untuk mendorong hubungan perdagangan dan investasi, KBRI telah membantu partisipasi pengusaha Indonesia dalam pelaksanaan Tunisia-Indonesia *partnership day* pada bulan Desember 2004. Selanjutnya KBRI melakukan kegiatan promosi dan business Luncheon pada bulan Mei 2005 di Tunis.⁵⁸ Sementara kegiatan tahun 2006

⁵⁷ <http://www.denlu.go.id/tunis> Dikutip Tanggal 2 Juli 2011

berupa kegiatan promosi perdagangan dan investasi yang telah dilakukan di 3 kota yaitu Sousse, Gabes dan Sfax.

Tunisia saat ini sedang gencar melakukan promosi pariwisata. Jumlah turis yang berkunjung ke Tunisia sekitar 5 juta orang pertahunnya.⁵⁹ Pengembangan dan promosi pariwisata Tunisia ini di jalankan pemerintah mengingat antara lain obyek pariwisata yang sangat bervariasi dari objek pariwisata pantai/laut hingga obyek wisata gurun. Stabilitas politik dan keamanan sangat mendukung kebijakan ini, seperti diketahui Tunisia adalah satu-satunya Negara Afrika Utara yang tidak mempunyai masalah/sengketa dengan Negara tetangga.

Untuk menyediakan fasilitas wisata tersebut, pemerintah Tunisia telah mendorong pengusaha Tunisia untuk membangun hotel-hotel. Saat ini hotel baru dalam tahap penyelesaian yang membuka peluang baru bagi pengusaha Indonesia untuk melakukan investasi di bidang pariwisata seperti tercantum dalam *Agreed Minutes Seventh Session Of The Comission* antara Indonesia-Tunisia yang dilaksanakan di Jakarta 1-2 Juli 2003.⁶⁰

Dengan melakkan *jont venture* antara pengusaha Tunisia dan pengusaha Indonesia untuk pengisian hotel berupa mebel ruang tamu, kamar tidur dan lainnya dalam bentuk *semi finished furnitures* yang kemudia diolah di Tuinsia untuk siap pakai. Di samping itu hasil perusahaan patungan ini pun dapat pula dipasarkan di Eropa dan Negara-negara sekitarnya oleh Tunisia. Dalam pemasaran ini selain kerjasama Tunisia-Uni Eropa juga dapat memanfaatkan persetujuan bilateral Tunisia, seperti contoh perjanjian *preferential trade agreement* yang telah ada dengan Negara tetangga lainnya.

⁵⁹ http://www.indonesiakreatif.net/Paparan_Dubes_RI_Tunisia.pdf

Pebuatan *Preferential Trade Agreement* dapat dipikirkan mengingat hal ini akan lebih banyak menguntungkan Indonesia dilihat dari sumber daya alam dan produk-produk yang ada dan dapat mendukung masuknya hasil produksi Indonesia ke Tunisia untuk bea masuk yang kecil serta memberikan fasilitas atas masuknya barang-barang Indonesia dengan tidak mengalami hambatan bea masuk.⁶¹

Tunisia telah menandatangani *Preferential Trade Agreement* dengan 5 negara yaitu Yordania, Maroko, Mesir, Kuwait dan Irak.⁶² Barang-barang produksi lima Negara tersebut dapat masuk ke pasar Tunisia dengan bea masuk secara bertahap dikurangi dan beberapa komoditi tertentu tanpa bea masuk. Komoditi tersebut antara lain: rempah-rempah, mebel plastik, mesin pemroses kayu, pompa air dan suku cadang mobil.

Pemerintah Tunisia menjajaki kerjasama perdagangan dengan Indonesia. Bentuk kerjasama perdagangan yang merupakan bagian *joint commission* ini dituangkan dalam bentuk investasi di bidang pariwisata. Tunisia membangun ribuan kamar hotel. Indonesia ditawarkan untuk mengisi peralatan di kamar-kamar tersebut. Pariwisata Tunisia sedang maju, karena lima juta wisata setiap tahun datang ke negeri itu.⁶³

Tunisia mengundang investor Indonesia untuk menanamkan modal di negeri Afrika Utara itu, terutama dibidang industri pariwisata yang prospeknya sangat baik. Banyak bidang industri dan perdagangan yang dapat dimanfaatkan pengusaha Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Texmaco dengan mendirikan pabrik tekstil di Tunisia. Letak Tunisia sangat strategis untuk menjadi batu loncatan pemasaran produk

⁶¹ ibid

⁶² <http://www.deplu.go.id> Dikutip pada tanggal 22 maret 2011

⁶³ ibid

Indonesia,⁶⁴ karena Tunisia merupakan satu-satunya Negara di Afrika yang sudah menandatangani kerjasama dengan masyarakat Eropa.

Tahun 1995 sekitar 4 juta wisatawan datang ke Tunisia, sebageian besar dari Eropa Barat. Tunisia memiliki banyak lokasi peninggalan bersejarah, pemandangan indah di pantai laut tengah, dan pemandangan eksotik gurun sahara sehingga menjadi tujuan wisatawan mancanegara. Investor Indonesia mempunyai peluang yang menguntungkan di sektor ini.

Hubungan Indonesia Tunisia setelah era presiden Habib bourguiba yaitu setelah tahun 1987 memberikan kemajuan pada hubungan yang selama era Habib bouiguiba hanya memfokuskan pada hubungan diplomatik. Terpilihnya Zine El Abidine Ben Ali sebagai Presiden Tunisia yang ke-2 memberikan warna baru pada hubungan Indonesia Tunisia yaitu menjalin kerjasama pada bidang-bidang perdagangan yang lebih efisien dan efektif. Ini terbukti lagi dalam bentuk partisipasi Indonesia dalam rangka menghadiri WSIS 2005 di Tunisia.⁶⁵

WSIS ini merupakan suatu inisiatif PBB yang memberikan mandat kepada ITU untuk mengamankan perwujudan masyarakat informasi di dunia secara merata dan komprehensif. WSIS I telah diadakan pada tanggal 10-12 Desember 2003 di Geneva dan telah dihadiri oleh puluhan kepala Negara dan Menteri-Menteri yang terkait dengan ICT, direksi penyelenggara telekomunikasi, kalangan LSM dan kalangan bisnis, dua dokumen yang berhasil dihasilkan oleh WSIS adalah *Declaration of Principles* (deklarasi yang merefleksikan keinginan dan komitmen pemerintah untuk membangun secara menyeluruh masyarakat informasi) dan *Plan of Action* (deklarasi yang bertujuan

⁶⁴ <http://www.kemlu.go.id>. Di Kutip Tanggal 6 Maret 2011

⁶⁵ <http://www.postel.go.id/> di Kutip Tanggal 25 Maret 2011

menterjemahkan rencana kongkrit visi dan prinsip-prinsip umum yang dinyatakan dalam *declaration of principles* dalam rangka mewujudkan keinginan bersama untuk mencapai dan mempromosikan pengembangan ICT untuk membantu mengatasi masalah kesenjangan digital).⁶⁶

WSIS 2 sebagai kelanjutan WSIS I rencananya akan menghasilkan dua dokumen penting, yaitu Tunis commitmet (*Political Chapeau*) sebagai payung politik para kepala Negara dalam mewujudkan masyarakat informasi, dan *Tunis Agenda for Actions* sebagai rencana bentuk operasional untuk mewujudkan masyarakat informasi yang meliputi *Finanicial Mechanism*, *Internet Governance* dan *Implementation* serta *Follow Up*.⁶⁷

Terkait dengan dua dokumen penting tersebut, Indonesia bersama Negara-Negara sedang berkembang lainnya bersemangat untuk memperjuangkan hak-hak yang harus diperoleh dalam rangka membentuk masyarakat infomasi, antara lain melalui peran sertanya dalam mengatur dan mengelola sumber daya internet yang kritis yang meliputi nama domain, alamat, IP, *system root zone* dan sebagainya. Juga diperjuangkan untuk mendapatkan akses yang setara dan biaya interkoneksi internet yang lebih murah, mendapatkan kemudahan dukungan dalam membangun infrastruktur termasuk pengembangan SDM dan transfer ilmu pengetahuan teknologi informasi yang terkait, membentuk suatu forum global guna mengawasi pengaturan internet dan mengurangi masalah digital divide.

Keseriusan dan komitmen Indonesia dan Negara-Negara sedang berkembang lainnya dalam WSIS II ini perlu diperjuangkan, karena sampai saat ini sempat muncul

⁶⁶ ibid

⁶⁷ <http://www.annic.net> di Kutip Tanggal 25 Maret 2011

citra negatif tentang keberadaan forum WSIS yang seakan-akan merupakan hanya produk-produk politik Negara-Negara industri maju dalam memperluas pasar perdagangan produk teknologi informasinya. citra negatif lainnya yang belum sepenuhnya hilang adalah bahwasanya WSIS sengaja diciptakan sebagai penyeimbang ITU yang selama ini cenderung lebih banyak membela kepentingan dan peranan Negara-Negara sedang berkembang dibandingkan kepentingan Negara-negara industri maju.⁶⁸

Menteri komunikasi dan informatika Sofyan A. Djalil yang memperoleh kesempatan untuk menyampaikan statemen pemerintah Republik Indonesia dalam KTT masyarakat informasi tersebut, akan mendorong lembaga-lembaga internasional seperti ITU, UNESCO, UNDP dan lainnya untuk secara bersama-sama dan berkesinambungan bagi upaya minimalisasi kesenjangan digital, sehingga forum WSIS secara sinergis dapat memberikan *guidance* dalam mengkoordinasikan kegiatan kerjasama secara regional maupun internasional.⁶⁹

Seandainya sebagaimana masyarakat umum masih ada yang mempertanyakan efektifitas dan efisiensi WSIS, khususnya hasil-hasil WSIS I dan dampaknya terhadap WSIS II, perlu kiranya diketahui, bahwasanya dengan adanya WSIS ini memungkinkan tiap-tiap Negara secara simultan dapat saling berinteraksi dan sharing informasi serta pengalaman dalam mengatasi digital divide.⁷⁰ WSIS selalu menetapkan target di antara pada suatu kurun waktu tertentu harus diupayakan terpenuhinya tingkat penetrasi akses telekomunikasi dan internet secara proporsional.

Dan untuk mengatasinya itu bukan semata-mata fokus dari Negara-Negara yang berkepentingan saja, tetapi juga Negara-Negara lain yang tergabung dalam WSIS ini.

⁶⁸ ibid

⁶⁹ <http://www.postel.go.id/>. Dikutip Tanggal 25 Maret 2011

⁷⁰ <http://www.postel.go.id/> Dikutip Tanggal 25 Maret 2011

Itulah sebabnya kurun waktu antara WSIS I (tahun 2003) dan WSIS II (tahun 2005) tidak terlalu lama, karena memungkinkan seluruh Negara untuk melakukan percepatan penyesuaian penyelesaian masalah kesenjangan digital, mengingat bagaimanapun juga semakin baik dan meratanya akses telekomunikasi, semakin konstruktif pula dampaknya bagi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Namun demikian, mengingat WSIS I maupun WSIS II kadangkala juga penuh dengan nuansa politik, maka unsur keterlibatan sejumlah pejabat tinggi Deplu RI dalam memberikan supervise dan koridor politik sangat berguna bagi posisi delegasi Indonesia.

Dalam rangkaian forum WSIS II tersebut, delegasi Indonesia tidak hanya berpartisipasi secara penuh dalam forum-forum persidangan, tetapi turut serta dalam pameran WSIS II. Pavilion Indonesia akan menampilkan ribuan brosur, poster, data visual dan berbagai data penting tentang kemajuan pengembangan ICT di Indonesia dengan tema potensi industri telekomunikasi dalam mengatasi kesenjangan digital. Seperti yang akan ditampilkan oleh unsur peserta pameran dari departemen kominfo (dengan tema pokok "*Building ICT for Schools and Communities*"), Ditjen Postel (*Universal Service Obligation*) BAPPENAS bekerjasama dengan perwakilan UNDP di Indonesia (*Information and Communication Technology for Poverty Reduction*), PSN (*Role of Satellite for Remote Area Communications*) Onno purbo (RT/RW Net) dan APW komitel (*The Future Model and Vision of Internet Café in Indonesia*)⁷¹

Perkembangan Ekpor-Impor Indonesia

⁷¹ Direktorat Jendral Pos dan telekomunikasi, Jakarta, 14 november 2005

Negara-Negara manapun di dunia ini tentu tidak terlepas dari aktifitas perdagangan dengan Negara lain, seiring perkembangannya maka tiap negara memiliki komoditas andalan untuk diperdagangkan dengan negara lain. Setiap negara memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda satu sama lain yang tidak terdapat di Negara lain, suatu Negara yang membutuhkan komoditi yang tidak tersedia di Negaranya tetapi tersedia di Negara lain, maka negara tersebut akan melakukan perdagangan atau pertukaran komoditi dengan Negara lain sehingga terjadilah kegiatan ekspor dan impor tiap Negara. Karena pentingnya hal itu maka tiap Negara melakukan kebijakan ekspor-impor. Ekspor impor merupakan kegiatan perdagangan yang memerlukan perhatian khusus bagi pemerintah kita dimana begitu beraneka ragamnya permasalahan yang dihadapi.⁷²

Sejak tahun 1987 ekspor Indonesia mulai didominasi oleh komoditi non migas dimana pada tahun-tahun sebelumnya masih didominasi oleh ekspor migas. Pergeseran ini terjadi setelah pemerintah mengeluarkan serangkaian kebijakan dan deregulasi di bidang ekspor, sehingga memungkinkan produsen untuk meningkatkan ekspor non migas. Pada tahun 1998 nilai ekspor non migas telah mencapai 83,88% dari total nilai ekspor Indonesia, sementara pada tahun 1999 peran nilai ekspor non migas tersebut sedikit menurun, menjadi 79,88% atau nilainya 38.873,2 juta US\$ (turun 5,13%). Hal ini berkaitan erat dengan krisis moneter yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997.⁷³

⁷² <http://zonaekis.com/search/asas-ekspor-impor>. Dikutip Tanggal 27 Maret 2011

⁷³ <http://youbil.ekonomi.blogspot.com/2010/04/ekspor-impor-indonesia.html>. Dikutip Tanggal 27 Maret 2011

Tahun 2000 terjadi peningkatan ekspor yang pesat, baik untuk total maupun tanpa migas, yaitu menjadi 62.124,0 juta US\$ (27,66) untuk total ekspor dan 47.757,4 juta US\$ (22,85%) untuk non migas. Namun peningkatan tersebut tidak berlanjut ditahun berikutnya. Pada tahun 2001 total ekspor hanya sebesar 56.320,9 juta US\$ (menurun 9,34%), demikian juga untuk ekspor non migas yang menurun 8,53%. Di tahun 2003 ekspor mengalami peningkatan menjadi 61.058,2 juta US\$ atau naik 6,82% banding ekspor tahun 2002 yang sebesar 57.158,8 juta US\$. Hal yang sama terjadi pada ekspor non migas yang naik 5,24% menjadi 47.406,8 juta US\$. Tahun 2004 ekspor kembali mengalami peningkatan menjadi 71.584,6 juta US\$ (naik 17,24%) demikian juga ekspor non migas naik 18,0% menjadi 55.939,3 juta US\$.

Tahun 2004 Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekspor non migas yang lebih tinggi dari tahun lalu sekitar 7%. Hal ini disampaikan dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh direktur fasilitasi ekspor dan impor disperindag, Andreas Anugrah, pada seminar *counter trade* untuk meningkatkan ekspor yang diadakan oleh pusat solusi bisnis. Meskipun 2004 ekonomi dunia belum membaik dan nilai dolar terus menurun, Indonesia berhasil mencapai target pertumbuhan ekspor nonmigas sedikit di atas target lima persen atau tepatnya 5,18 persen.⁷⁴

Pada tahun 2006 nilai ekspor menembus angka 100 juta US\$ menjadi 100.798,6 juta US\$ atau naik 17,67%, begitu juga dengan ekspor non migas yang naik 19,81% dibandingkan tahun 2005 menjadi 79.589,1 juta US\$.⁷⁵

⁷⁴ Tempo, pemerintah indonesia manfaatkan imbal dagang untuk genjot ekspor, 9 februari 2004

Selama lima tahun terakhir, nilai impor Indonesia menunjukkan trend meningkat rata-rata sebesar 45.826,1 juta US\$ per tahun. Pada tahun 2006, total impor tercatat sebesar 61.065,5 juta US\$ atau meningkat sebesar 3.364,6 juta US\$ (5,83%) dibandingkan tahun 2005. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya impor migas sebesar 1.505,2 juta US\$ (8,62%) menjadi 18.962,9 juta US\$ dan non migas sebesar 1.859,4 juta US\$ (4,62%) menjadi 42.102,6 juta US\$. Pada periode yang sama, peningkatan impor terbesar 54,15% dan non migas sebesar 39,51%. Dilihat dari kontribusinya, rata-rata peranan impor migas terhadap total impor selama lima tahun terakhir mencapai 26,15% dan non migas sebesar 73,85% per tahun. Dibandingkan tahun sebelumnya, peranan impor migas meningkat dari 30,26% menjadi 31,05% di tahun 2006. Sedangkan peranan impor non migas menurun dari 69,74% menjadi 68,95%.⁷⁶

Untuk mempertahankan sekaligus memacu pertumbuhan ekspor yang lebih cepat, pemerintah telah membentuk kelompok kerja nasional peningkatan ekspor (KNPE) yang bertugas merumuskan kebijakan jangka pendek untuk menciptakan iklim kondusif yang dapat memperluas dan mengembangkan pasar ekspor. Saat ini tidak kurang dari 130 negara melaksanakan perdagangan internasional dengan sistem imbal dagang dengan nilai sekitar US\$ 500 miliar atau kurang lebih 30 persen dari nilai perdagangan dunia. Umumnya Negara-Negara tersebut mensyaratkan sistem imbal dagang atas berbagai pembelian untuk proyek pemerintah.⁷⁷

Sistem ini dapat memacu pertumbuhan industri di dalam negeri, membuka kesempatan kerja yang lebih luas, selain penghematan devisa. Setidaknya, berbagai proyek peremajaan peralatan angkatan bersenjata, kepolisian, dan bea cukai bila dilaksanakan dengan sistem imbal dagang dapat memicu pertumbuhan ekonomi nasional.

E. Peluang Indonesia Melihat Hubungan Tunisia dan Uni Eropa 2008

Indonesia dan Tunisia bagaikan saudara jauh yang lama tidak jumpa, dan setelah lima puluh tahun menjalin kerjasama diplomatik, nama Indonesia kembali bergema sampai ke sudut sudut kampung pemerintahan kota di Tunisia. karena di Setiap penampilan tim kesenian Indonesia yang khusus didatangkan KBRI Tunis untuk merayakan peringatan 50 tahun sekaligus mengikuti berbagai festival yang digelar di berbagai kota di Tunis, nama Indonesia bagaikan magnet yang kembali bergema. Begitu pun saat mereka mengikuti karnaval di kota Sousse, sekitar 140 km selatan Tunisia, tim kesenian dari UI dengan busana berbagai daerah dan gerakan tari yang didampingi tiga staf dari KBRI Tunis dengan membawa Bendera Merah Putih bertuliskan "Indonesie", memukau ribuan warga dan wisatawan mancanegara yang memadati jalan utama tepi pantai.⁷⁸

Di Tunisia, Karnaval Aoussou adalah 'Event' kultural tahunan yang menyedot paling banyak pengunjung secara bersamaan dalam satu waktu, pelaksanaan kehidupan di bidang politik, ekonomi dan sosial di Tunisia relatif berjalan mantap dan stabil, bahkan dapat dikatakan makin mesra di bawah kepemimpinan Presiden Zine El

⁷⁸ <http://www.antaranews.com/berita/1280852647/hubungan-ri-tunisia-makin-erat>. Dikutip Tanggal 22 Juni

Abidine Ben Ali yang berkuasa sejak 7 Nopember 1987. Kondisi kondusif tersebut berpengaruh positif pada peningkatan kinerja ekonomi Tunisia, yang pada gilirannya semakin memperkokoh stabilitas politik dan keamanan Tunisia. kondisi dalam negeri yang aman dan stabil tersebut, memungkinkan Tunisia aktif menjalankan kebijakan luar negerinya di tingkat subregional bersama negara-negara Arab Magribi.⁷⁹ Kondisi serupa terjadi pada tingkat regional dengan negara-negara Arab di sekitar Laut Tengah/Mediterrania serta di tingkat internasional, terutama dalam kerangka PBB, serta dalam kerangka Gerakan Non-Blok dan Organisasi Konperensi Islam.

Dalam setiap kesempatan Tunisia berupaya untuk memperkokoh hubungan dan kerjasama bilateral, khususnya bagi kepentingan integrasi ekonomi Tunisia di mana Tunisia telah memberlakukan perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa sejak 1 Januari 2008. Hal ini sangat menguntungkan bagi Indonesia.

Keberhasilan Tunisia dalam mengelola ekonominya disampaikan pakar ekonomi dunia dan sekaligus pemenang dua hadiah Nobel dari AS, Joseph Stiglitz. Pernyataan itu penting bagi Tunisia yang melaksanakan demokrasi dengan menitikberatkan kebijakan pada pembangunan ekonomi. Pujian tersebut merupakan barometer bagi pemerintah tentang bagaimana berhasilnya Presiden Ben Ali dalam menangani ekonomi. Sebelumnya, beberapa pengamat ekonomi juga telah menyampaikan pendapatnya bahwa pemerintah relatif berhasil dalam mengendalikan ekonomi, sehingga dampak buruk krisis ekonomi global dapat diminimalkan. Stabilitasnya ekonomi Tunisia juga karena keberhasilan proses integrasi ekonomi yang dilakukan Tunisia, khususnya sejak diberlakukannya perjanjian perdagangan bebas Tunisia dan

Uni Eropa (UE) tanggal 1 Januari 2008, sehingga hubungan ekonomi Tunisia dan UE menunjukkan peningkatan.

Dengan diberlakukannya perjanjian tersebut, Tunisia merupakan negara pertama bagian selatan Mediterania dan negara Afrika pertama yang menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa. Hal ini harusnya dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk bisa masuk ke Uni Eropa. Kecilnya dampak krisis terhadap kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) tidak terlepas dari faktor kedekatan letak geografis dengan negara-negara Eropa.

Kedekatan geografis tersebut membuat biaya wisata ke Tunisia relatif masih terjangkau, meski dalam kondisi krisis ekonomi. Letak Tunisia sangat menguntungkan ditinjau dari jalur lalu lintas distribusi barang dan jasa serta lalu lintas manusia. Transportasi udara dari Tunisia ke kota terdekat di Eropa seperti Roma dapat ditempuh dalam waktu satu jam perjalanan udara. Staf ahli Menlu itu mengatakan, kondisi sosial politik yang relatif stabil juga menjadikan Tunisia merupakan target utama wisatawan Eropa di mana saat ini komposisi wisatawan Eropa tetap yang tertinggi mencapai 80 persen. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Tunisia diproyeksikan pada tahun 2012 akan sama dengan jumlah penduduknya.

Pemerintah Tunisia memelihara stabilitas politik dan keamanan sebagai modal utama dalam melaksanakan ekonominya. Stabilitas politik dan keamanan diperlukan untuk menarik investasi asing dan pariwisata. Tunisia merupakan Negara yang paling stabil, aman, damai di kawasan Afrika Utara. Hal tersebut telah menjadi keunggulan komparatif Tunisia dibandingkan negara tetangganya di kawasan Maghribi. Kebiasaan

luar negeri Tunisia akan memberi prioritas pada penguatan hubungan dan kerjasama dengan mitra utamanya, Uni Eropa. Pada tahun 2010, Tunisia telah mengajukan secara resmi untuk mendapatkan status "*Advanced Partner*" dari Uni Eropa. Status tersebut akan memberikan pengaruh yang lebih kepada Tunisia dalam hubungan perdagangan dengan Uni Eropa dan statusnya di dunia Internasional.

Kinerja ekonomi Tunisia tahun 2009 dinilai cukup baik bila mempertimbangkan krisis finansial dan ekonomi yang terjadi di dunia. Menurut data yang dikeluarkan oleh *Banque Centrale de Tunisie*, Pertumbuhan GDP Tunisia tahun 2009 mencapai 3%, kenaikan tertinggi tercatat pada sektor pertanian dan perikanan (6%) dan penurunan tertinggi pada sektor industri manufaktur (-6%). Penyumbang terbesar pada GDP tahun 2009 adalah sektor *market services* (termasuk di dalamnya pariwisata) yang berkontribusi 39,8% disusul oleh industri manufaktur 17,6%, industri non manufaktur 17,4%, non-market services 14,3% dan pertanian dan perikanan 10,9%. Adapun pendapatan per kapita pada tahun 2009 mencapai US\$ 3.908, meningkat dari tahun 2008 sebesar US\$ 3.800. Di sisi lain, tingkat inflasi pada tahun 2009 berhasil ditekan pada angka 3,5%, turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 5%.⁸⁰

Jadi melihat peluang hubungan Tunisia dan Uni Eropa tersebut, pengusaha UKM Indonesia dapat memanfaatkan kerjasama tersebut untuk memasuki pasar di kawasan Uni Eropa, mengingat Tunisia telah memberlakukan perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa sejak 1 Januari 2008. Sedangkan dalam bidang pendidikan, ia menawarkan agar Provinsi Jatim mengirim mahasiswa S1 untuk menemnuh pendidikan

di Jurusan Syariah, dan Peradaban Arab Universitas Az-zaytunah, Tunisia. "Persepsi Islam di Tunisia lebih moderat, sehingga lebih cocok dengan Indonesia."⁸¹

Negara berpenduduk 10,3 juta ini mempunyai peluang usaha di Uni Eropa sebesar US\$570 juta serta US\$60 di kawasan Afrika. "Oleh karena itu peluang tersebut harus digunakan oleh pengusaha UKM Jatim, agar tidak didahului Cina dan India.

Dalam memperingati Hari Ulang Tahun ke-50 Hubungan Diplomat RI-Tunisia KBRI Tunis ikut berpartisipasi dalam pameran ke-2 *Internasional Food Processing Industry and Services* (SIAS 2010) di kota wisata Hammamet yang berlangsung tanggal 24-26 September 2010. Keikutsertaan KBRI Tunis ini atas undangan panitia setelah KBRI Tunis berhasil menjadi *stand* yang paling banyak dikunjungi pada Pameran ke-8 produk pertanian *Salon méditerranéen de l'agriculture et des industries alimentaires* yang dilaksanakan di kota industri Sfax tanggal 26-29 Mei 2010 di mana KBRI Tunis memperoleh dua penghargaan, dan keberhasilan dalam Pameran Pasar Pariwisata Internasional Mediterania atau *Marché méditerranéen international du tourisme (M.I.T)* ke-16 di Charguia, Tunis, pada tanggal 20-22 Mei 2010.⁸²

Berbagai produk khas Indonesia khususnya produk pertanian unggulan seperti kelapa sawit, coklat, kopi, teh diperagakan pada pameran produk makanan tersebut. Produk makanan seperti kripik pisang, kripik nanas, kripik nangka, kripik mangga, kripik bayam, kripik apel, kripik sukun, kripik singkong, kripik jagung dan kripik tempe yang dipamerkan sangat menarik perhatian pengunjung karena cocok di lidah masyarakat Tunisia.⁸³

⁸¹ <http://www.eastjavacoop.com/>. Dikutip Tanggal 15 Mei 2011

⁸² <http://www.kemlu.go.id/Lists/EmbassiesNews/DispForm.aspx?ID=3052>. Dikutip Tanggal 15 Mei 2011

⁸³ *ibid*

Kemudian yang berpotensi lagi dan memiliki peluang besar bagi produk ekspor Indonesia adalah kerajinan tangan atau handicraft. Sebenarnya begitu banyak permintaan untuk masuk pasar Tunisia, tetapi pengusaha handicraft Indonesia memang belum berkonsentrasi untuk masuk ke pasar Tunisia.⁸⁴Melalui penandatanganan nota kesepahaman, kedua belah pihak bersepakat mendorong pengembangan produksi dan perdagangan kerajinan tangan di kedua Negara. Kerajinan tangan diyakini dapat memperkuat kinerja ekspor nonmigas Indonesia ke Tunisia. Ketua Federasi Nasional Handicraft Tunisia Mohamed Borhane SFIA menjelaskan, Indonesia dapat memanfaatkan Tunisia sebagai gerbang untuk menembus pasar Uni Eropa. Sebab Di Tunisia, kerajinan tangan menyumbang 4 persen dari total produk domestik bruto.

Untuk kerajinan (handicraft), Tunisia menyediakan peluang yang sangat besar bagi produk kerajinan dari Indonesia. Dengan semakin meningkatnya jumlah wisatawan asing setiap tahunnya yang datang ke Tunisia (7,2 juta orang), sektor kerajinan telah menjadi sektor penting dalam perekonomian Tunisia. Sektor ini menciptakan 300 ribu lapangan kerja bagi masyarakat Tunisia

Kontribusinya terhadap GDP juga cukup besar, yaitu 3,8%. Adapun kontribusinya terhadap volume ekspor adalah sebesar 2,2%. Semakin meningkatnya industri kerajinan di Tunisia masih belum mencukupi permintaan pasar terhadap produk kerajinan Tunisia, sehingga sektor pariwisata Tunisia masih harus mengimpor produk kerajinan khas Tunisia dari beberapa negara Asia, terutama China dan Indonesia. Meski dari segi harga masih sedikit lebih mahal dari produk China, produk Indonesia telah cukup berhasil memikat minat pasar Tunisia, dikarenakan kualitas dan

⁸⁴ <http://iswekon.wordpress.com/2009/01/21/289/>. Dikutin Tanggal 22 Juni 2011

finishing yang dinilai relatif lebih baik. Saat ini, beberapa pusat penjualan souvenir di kawasan turis utama di kota Tunis, Hammamet dan Sousse secara rutin mengimpor produk kerajinan khas Tunisia dari Indonesia (souvenir yang terbuat dari kerang dan kayu), terutama dari Bali. Pusat souvenir yang besar memesan kerajinan dari Indonesia sebanyak 2 kontainer setiap bulannya pada saat *peak season*.⁸⁵

Dan banyak masih banyak lagi produk-produk dari Indonesia yang memiliki peluang ekspor ke pasar Tunisia. Diantara Produk ekspor utama Indonesia ke negara itu adalah minyak sawit mentah, minyak kelapa mentah, karet, dan tekstil.⁸⁶

⁸⁵ Ibid hal 16

⁸⁶ <http://giswekon.wordpress.com/2009/01/21/289/> Dikutip Tanggal 22 Juni 2011